Budi Aspani, Pergeseran Hak Prerogatif Presiden Pasca Amandemen Undang-Undang Dasar 1945, Halaman 91-111

PERGESERAN HAK PREROGATIF PRESIDEN PASCA AMANDEMEN UNDANG-UNDANG DASAR 1945

Budi Aspani

Fakultas Hukum Universitas Palembang

E-mail: budiaspani@yahoo.com

Abstract

The President as the Head of State has prerogative rights besides having authority in outgoing relations contained in the 1945 Constitution. In the case of the formation, amendment and dissolution of state ministries after the 1945 Constitution Amendments do not become the full authority of the President, but are based on the law (Article 17 paragraph (4) of the 1945 Constitution), so that there will be no more unilateral dissolution of a state ministry by the President. The issues to be discussed are as follows: What has been changed in the amendment to the 1945 Constitution regarding the President's Prerogative Rights, and how the amendments to the 1945 Constitution on the President's Prerogative Rights on the government system in Indonesia. With the amendment of the 1945 Constitution four times, it has an influence on the position of the President in exercising his prerogative rights. The President's prerogative right before the amendment is not fully implemented to carry out the President's Constitutional obligations, but is related to political content. After the amendment to the 1945 Constitution there was a shift in the application of the President's prerogative rights, namely by including other state institutions in the implementation of the prerogative. Amendments to the 1945 Constitution on the President's Prerogative Rights did not result in a change in the Indonesian government system.

Keywords: *President's prerogative*

Abstrak

Presiden sebagai Kepala Negara mempunyai hak prerogatif selain mempunyai kewenangan dalam hubungan keluar yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar 1945. Dalam hal pembentukan, pengubahan, dan pembubaran kementerian negara setelah dilakukan Amandemen UUD 1945 tidak menjadi kewenangan penuh Presiden, akan tetapi didasarkan pada undang-undang (Pasal 17 ayat (4) UUD 1945), sehingga tidak terjadi lagi pembubaran suatu kementerian negara secara sepihak oleh Presiden. Permasalahan yang akan dibahas adalah sebagai berikut: Apa saja yang diubah dalam amandemen UUD 1945 mengenai Hak Prerogatif Presiden, serta bagaimana pengaruh amandemen UUD 1945 pada Hak Prerogatif Presiden terhadap sistem pemerintahan di Indonesia. Dengan dilakukannya amandemen UUD 1945 sebanyak empat kali, mempunyai pengaruh terhadap kedudukan Presiden dalam melaksanakan hak prerogatifnya. Hak prerogatif Presiden yang sebelum amandemen dilaksanakan tidak seutuhnya untuk melaksanakan kewajiban Konstitusional Presiden, akan tetapi terkait muatan politik. Setelah amandemen UUD 1945 terjadi pergeseran dalam penerapan hak prerogatif Presiden, yaitu dengan diikutsertakan lembaga negara lainnya dalam pelaksanaan hak prerogatif. Amandemen UUD 1945 pada hak Prerogatif Presiden tidak mengakibatkan berubahnya sistem pemerintahan Indonesia.

Kata Kunci: hak prerogatif Presiden

PENDAHULUAN

Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 menyatakan bahwa kedaulatan berada ditangan rakyat dan

dilaksanakan menurut UUD. Dalam pelaksanaan kedaulatan ini didistribusikan kepada lembaga-lembaga negara, yaitu: Majelis

Budi Aspani, Pergeseran Hak Prerogatif Presiden Pasca Amandemen Undang-Undang Dasar 1945, Halaman 91-111

Permusyawaratan Rakyat (MPR), Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Mahkamah Agung (MA), Mahkamah Konstitusi, Komisi Yudisial, Komisi Pemilihan Umum, Dewan Perwakilan Daerah, Tentara Nasional Indonesia (TNI dan Kepolisian Negara RI (POLRI)).¹

Dalam kedudukan sebagai Kepala Negara, Presiden mempunyai hak-hak prerogatif selain mempunyai kewenangan ke dalam juga kewenangan dalam hubungan keluar yang terdapat dalam UUD 1945. berdasarkan kedudukan dan kewenangan Presiden sebagai Kepala Negara, harus dalam konteks kedaulatan rakyat yang dilaksanakan menurut UUD 1945.

Peristiwa-peristiwa pemberhentian maupun penggantian menteri yang telah terjadi selama ini merupakan salah satu contoh yang menyebabkan timbulnya permasalahan mengenai hak prerogatif. Secara hukum pemberhentian dan penggantian itu merupakan kewenangan Presiden sebagai pemegang hak prerogatif tersebut. Peristiwa ini kemudian

memunculkan penilaian, bahwa selama ini hak prerogatif bukan murni dilaksanakan untuk memenuhi tugas kewajiban Konstitusional Presiden, tetapi sering dipergunakan sebagai imbal jasa politik, artinya diberikan sebagai hadiah kepada mereka yang secara politik berjasa kepada Presiden.

Dalam hal pembentukan, pengubahan, dan pembubaran kementerian negara itu setelah dilakukan amandemen UUD 1945 tidak menjadi kewenangan penuh Presiden, semuanya itu harus didasarkan pada undang-undang (Pasal 17 ayat (4) UUD 1945). Sehingga tidak terjadi lagi pembubaran suatu kementerian negara secara sepihak oleh Presiden.

Timbullah pemikiran bahwa dengan adanya amandemen terhadap beberapa Pasal dalam UUD 1945, khususnya yang mengenai hak prerogatif perlu dibatasi dan dipertegas dalam hal-hal tertentu saja. Sedangkan dalam hal-hal tertentu lainnya sebaiknya dimintakan konfirmasi dulu kepada DPR atau lembaga tertentu.

Permasalahan dalam penulisan ini adalah apa saja yang diubah dalam amandemen UUD 1945 mengenai Hak Prerogatif Presiden, serta bagaimana

¹ H. Marshaal, *Amandemen UUD 1945 Dalam Sorotan* (Palembang: UMP, 2003).

Budi Aspani, Pergeseran Hak Prerogatif Presiden Pasca Amandemen Undang-Undang Dasar 1945, Halaman 91-111

pengaruh amandemen UUD 1945 mengenai Hak Prerogatif Presiden terhadap sistem pemerintahan di Indonesia. Lingkup pembahasan yang berkaitan dengan hak prerogatif Presiden yang diatur dalam UUD 1945, dan implikasinya terhadap pergeseran hak prerogatif setelah amandemen UUD 1945 terhadap sistem pemerintahan Indonesia.

PEMBAHASAN

A. Hak Prerogatif Menuurut Konstitusi Yang Berlaku di Indonesia

Sejak Indonesia merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945 sampai sekarang, di Indonesia telah mengalami pergantian UUDnya sebanyak tiga kali, yaitu UUD 1945 digantikan dengan KRIS 1949, KRIS 1949 digantikan dengan UUDS 1950 dan UUDS 1950 digantikan kembali dengan UUD 1945. setelah mengalami pergantian-pergantian UUD, akhirnya UUD 1945 yang sejak dikeluarkannya Dekrit Presiden 5 Juli 1959 berlaku kembali dan pada era Reformasi ini telah di amandemen oleh MPR.

1. Menurut Undang-Undang Dasar 1945

Dalam batang tubuh UUD 1945 terdapat Pasal-Pasal tentang hak

prerogatif Presiden, yaitu:

(1) Pasal 5 ayat (2) UUD 1945: Presiden menetapkan Peraturan Pemerintah untuk menjalankan Undang-Undang sebagaimana mestinya.

Fungsi Peraturan Pemerintah (PP) yang dimaksud ini adalah untuk mengatur pelaksanaan ketentuan-ketentuan yang telah lebih dahulu tercantum dalam undang-undang. Tegasnya PP ini dibuat oleh pihak eksekutif yaitu Presiden. Bisa saja dalam suatu undang-undang yang dibuat oleh DPR bersama pemerintah sesuatu hal tidak secara terperinci diatur, sehingga untuk pelaksanaannya harus diatur dan diperinci lagi di dalam PP tersebut. Dalam hal ini, instansi pembuat undang-undang menyerahkan kekuasaan perundang-undangan kepada instansi eksekutif untuk mengatur selanjutnya hal yang dimaksud.

(2) Pasal 10 UUD 1945: Presiden memegang kekuasaan yang tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Laut dan Angkatan Udara.

Menurut penjelasan UUD 1945, kekuasaan yang tersebut dalam

Pasal 10 UUD 1945 tersebut termasuk konsekuensi dari kedudukan Presiden sebagai kepala negara. Kedudukan Presiden di dalam Pasal ini bukan sebagai Commander in Chief melainkan sebagai konsekuensi dari kedudukan Presiden sebagai Kepala Negara dan yang dimaksud dengan kekuasaan tersebut di atas adalah bahwa Presiden tidak mempunyai wewenang komando atas angkatan perang Indonesia, melainkan wewenang menentukan hal-hal yang strategis saja.

- (3) Pasal 11 UUD 1945: Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain.

Dari ketentuan Pasal 11 UUD 1945 di atas diketahui apakah akan perang ataupun damai dengan negara lain, rakyat turut menentukannya lewat perwakilannya di DPR. Perang, damai dan membuat perjanjian adalah tindakan yang menyangkut pergaulan dan politik nasional. Maka ketiga macam tindakan ini selain berpedoman kepada hukum dan politik nasional juga

berpedoman kepada hukum internasional dan dilakukan oleh Presiden dengan bantuan organ politik luar negeri.

Mengenai perjanjian dengan negara lain, persetujuan dari DPR biasanya harus diperoleh pada waktu akan diadakan pengesahan atau ratifikasi dari suatu perjanjian internasional, yang sebelumnya sudah ditandatangani oleh Menteri Luar Negeri atau seorang Duta Besar dari masing-masing pihak dan suatu negara baru terikat oleh suatu perjanjian setelah perjanjian itu diratifikasi.

- (4) Pasal 12 UUD 1945: Presiden menyatakan keadaan bahaya. Syarat-syarat dan akibat keadaan bahaya ditetapkan dalam undang-undang.

Yang di atur dalam Pasal 12 UUD 1945 di atas pada pokoknya adalah bahwa yang berwenang menyatakan keadaan bahaya adalah Presiden, berarti melalui suatu keputusan Presiden. akibat dari keadaan bahaya yang diumumkan itu diatur dalam suatu undang-undang, demikian juga perihal syarat-syarat untuk menyatakan bahaya sebelum

Presiden menyatakan keadaan bahaya, lebih dulu memperhatikan situasi dan memperhatikan kepada pedoman yang mengatur persyaratan keadaan bahaya ataupun Peraturan Pengganti Undang-Undang (Perpu). Dalam ketentuan Perpu yang pernah ada yaitu Perpu Nomor 23 Tahun 1959 maka dikeluarkan Keppres Nomor 315 Tahun 1959 yang menyatakan seluruh wilayah Indonesia dalam keadaan perang dan berlaku mulai tanggal 16 Desember 1959. Dalam Perpu ini ditentukan tiga macam tingkatan keadaan bahaya dengan syarat sebagai berikut:

1. Keadaan darurat sipil; apabila keamanan atau ketertiban hukum diseluruh wilayah atau sebagian wilayah Republik Indonesia terancam oleh pemberontakan, kerusuhan-kerusuhan atau akibat bencana alam, sehingga dikhawatirkan tidak dapat diatasi oleh alat-alat perlengkapan negara secara biasa.
 2. Keadaan darurat militer; apabila timbul perang atau dikhawatirkan perampasan wilayah RI dengan cara apapun.
 3. Keadaan perang; apabila hidup negara berada dalam keadaan bahaya atau dari keadaan khusus ternyata ada dikhawatirkan ada gejala-gejala yang dapat membahayakan kehidupan negara.
- (5) Pasal 13 UUD 1945: (1) Presiden mengangkat duta dan konsul; (2) Presiden menerima duta negara lain.
- Pengangkatan duta dan konsul oleh Presiden ini berarti bahwa duta dan konsul merupakan pegawai negeri istimewa, yang pengangkatannya tidak diserahkan kepada seorang menteri. Pengangkatan ini dapat dimengerti oleh karena mereka mewakili resmi negara dalam hubungan internasional dengan pemerintah negara asing dimana mereka ditempatkan.
- Seluruh tindakan dan kebijaksanaan tentang pengangkatan dan penerimaan wakil-wakil negara lain adalah termasuk kebijaksanaan mengatur relasi internasional. Selain terikat oleh norma-norma hukum nasional juga terikat oleh norma-norma hukum internasional.
- Setiap negara berhak mengirimkan

Budi Aspani, Pergeseran Hak Prerogatif Presiden Pasca Amandemen Undang-Undang Dasar 1945, Halaman 91-111

wakilnya, tidak berarti wajib mengirimnya. Jadi boleh tidak mempergunakan hak itu, jika dipandang tidak perlu. Tetapi setiap negara dalam keadaan normal berkewajiban menerima wakil diplomatik dari negara lain dan seharusnya mengirim wakilnya pula ke negara yang bersangkutan.

- (6) Pasal 14 UUD 1945: Presiden memberi grasi, amnesti, abolisi dan rehabilitasi.

Grasi adalah hak Kepala Negara untuk menghapuskan hukuman keseluruhannya ataupun sebagian yang dijatuhkan oleh hakim dengan keputusan yang tidak dapat diubah lagi kepada seseorang ataupun menukar hukuman itu dengan yang lebih ringan menurut urutan tersebut dalam Pasal 10 KUHP. Grasi diberikan kepada seseorang atas permohonan kepada Kepala Negara. Grasi diberikan dalam hal kejahatan biasa dan diberikan setelah selesainya penuntutan dan telah dijatuhkan hukuman. Jika kepada seseorang telah berikan grasi, kejahatan yang telah dilakukannya dan telah dijatuhkan hukuman itu dipandang masih ada, sehingga kalau ia mengulang

berbuat kejahatan lagi, maka dalam hal ini dipandang ada pengulangan recidive sehingga berakibat memberatkan hukuman.

Amnesti adalah hak Kepala Negara untuk meniadakan akibat hukum yang mengancam terhadap suatu perbuatan atau sekelompok kejahatan. Amnesti diberikan secara massal terhadap suatu perbuatan atau sekelompok kejahatan. Dalam hal ini kejahatan yang dimaksud seolah-olah dilupakan dan dipandang tidak ada, sehingga tidak berakibat hukum apa-apa. Amnesti lahir atas inisiatif Kepala Negara sendiri, bukan dimohon. Dalam hal amnesti, andaikata orang yang bersangkutan berbuat jahat lagi setelah adanya amnesti, disini kejahatan yang pertama yang diberi amnesti dipandang tidak ada lagi, sehingga kejahatan yang berikutnya tidak dipandang sebagai pengulangan dan tidak berakibat memberatkan hukuman.

Abolisi adalah hak Kepala Negara untuk menggugurkan hak penuntutan umum buat menuntut seseorang. Abolisi berlaku dalam hak kejahatan politik seperti

Budi Aspani, Pergeseran Hak Prerogatif Presiden Pasca Amandemen Undang-Undang Dasar 1945, Halaman 91-111

- amnesti dan abolisi diberikan secara massal ataupun satu orang pada saat sebelum adanya penuntutan.
- Rehabilitasi adalah hak Kepala Negara untuk mengembalikan seseorang kepada kedudukan dan nama baiknya yang semula tercemar oleh karena suatu keputusan hakim yang tidak benar.
- (7) Pasal 15 UUD 1945: Presiden memberi gelar, tanda jasa dan lain-lain tanda kehormatan.
- Pemberian gelar dan tanda jasa ini tidak hanya diberikan kepada warga negara Indonesia, melainkan juga kepada pejabat-pejabat dari negara asing yang dianggap oleh Indonesia telah berjasa. Pemberian tanda-tanda ini kepada warga negara Indonesia ada yang disertai peraturan bahwa si penerima tanda-tanda itu mendapat perlakuan istimewa.
- (8) Pasal 17 ayat (2) UUD 1945: Menteri-menteri itu diangkat dan diberhentikan oleh Presiden.
- Menteri-menteri ini sebagai pembantu Presiden bertanggungjawab kepada Presiden bukan kepada DPR atau MPR. Presidenlah yang
- mempertanggungjawabkan segala tindakan pemerintah kepada MPR. Menurut sistem Presidensiil ini, dengan adanya Presiden saja telah ada pemerintahan.
- Kedudukan menteri itu tergantung pada Presiden. Presiden berhak penuh mengangkat, memberhentikan, menggantikan menteri dan tidak lagi diperlukan adanya badan sebagai formatur yang berhak menyusun komposisi dan personalia kabinet, berpedoman kepada efisiensi kerja.
- Menteri-menteri negara adalah pemimpin departemen. Dalam praktek menteri-menteri inilah yang terutama menjalankan kekuasaan eksekutif. Merekalah yang lebih mengerti tentang seluk beluk departemennya dan pada hakikatnya mereka berpengaruh pada Presiden dalam menentukan kebijaksanaan pemerintah dalam lingkungan departemen masing-masing.
- (9) Pasal 22 ayat (1) UUD 1945: Dalam hal kepentingan yang memaksa, Presiden berhak menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang.
- Dalam Pasal ini memberikan hak

kepada pemerintah Presiden) untuk membuat peraturan darurat. Peraturan darurat yang dimaksud adalah Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu). Hak membuat peraturan darurat ini hanya boleh digunakan bila ada hal kegentingan yang memaksa.

Di negara yang aktif menyelenggarakan kesejahteraan umum yakni di negara hukum yang modern, pemerintah sebagai organ eksekutif diikursertakan aktif bahkan untuk menetapkan kebijaksanaan dan langkah-langkah tertentu secara tegas dan cepat, apalagi dalam keadaan mendesak buat menyelenggarakan kesejahteraan rakyat. Jadi sebagian dari pada kekuasaan legislatif dari DPR dialihkan kepada pemerintah sepihak. Untuk pelaksanaannya pemerintah dalam Pasal ini diberikan fungsi legislatif yaitu suatu kekuasaan perundang-undangan dalam membuat Perpu.

Kekuasaan undang-undang atas inisiatif sendiri itu, hanya diberikan kepada pemerintah dalam hal adanya keadaan yang memaksa atau mendesak, yaitu pemerintah harus bertindak cepat dan tegas

yang penyelenggaraannya tidak dapat ditunda lagi dan tidak dapat ditunggu lagi tersusunnya suatu undang-undang sebagai hasil kompromi antara DPR dan pemerintah. Dalam pembuatan Perpu, memang hak inisiatif diberikan sepenuhnya di tangan pemerintah yang diberikan oleh UUD.²

2. Menurut Konstitusi Republik Indonesia Serikat (KRIS) 1949

Dalam batang tubuh Konstitusi RIS 1949 itu terdapat Pasal-Pasal tentang hak prerogatif Presiden, antara lain:

(1) Pasal 141 ayat (1) KRIS 1949: Peraturan-peraturan menjalankan undang-undang ditetapkan oleh pemerintah. Namanya ialah Peraturan Pemerintah.

Dalam Pasal ini dimaksud dengan pemerintah yang menetapkan peraturan-peraturan yang menjalankan undang-undang yang selanjutnya disebut Peraturan Pemerintah adalah Presiden dan menteri-menteri bersama.

(2) Pasal 182 ayat (1) KRIS 1949: Presiden adalah Panglima Tertinggi

² M. Solly Lubis, *Ketatanegaraan RI* (Bandung: Mandar Maju, 1993).

Tentara Republik Indonesia Serikat.

Kedudukan Presiden sebagai panglima tertinggi disini dimaksudkan bahwa Presiden memiliki kedudukan sebagai commander in chief. Setiap angkatan mempunyai panglima dan pemerintah jika perlu menetapkan tentara-tentara dari tiap angkatan dibawah seorang panglima umum dan Menteri Pertahanan dapat ditunjuk untuk merangkap jabatan itu. Opsir-opsir diangkat, dinaikkan pangkat dan diberhentikan oleh atau atas nama Presiden menurut aturan-aturan yang ditetapkan dengan undang-undang federal.

(3) Pasal 175 KRIS 1949:

1. Presiden mengadakan dan mengesahkan segala perjanjian (traktat) dan persetujuan lain dengan negara-negara lain. Kecuali ditentukan lain dengan UU federal, perjanjian atau persetujuan lain tidak disahkan, melainkan jika sudah disetujui dengan UU.
2. Masuk dalam dan memutuskan perjanjian dan persetujuan lain, hanya dilakukan oleh Presiden dengan kuasa UU federal.

(4) Pasal 177 KRIS 1949: Pemerintah berusaha memecahkan perselisihan-perselisihan dengan negara lain dengan jalan damai dan dalam hal itu memutuskan pula tentang meminta ataupun tentang menerima pengadilan atau perwasitan antar negara.

(5) Pasal 184 ayat (1) KRIS 1949: Dengan cara dan dalam hal-hal yang akan ditentukan dengan undang-undang federal, pemerintah dapat menyatakan daerah RIS atau bagian-bagian daripadanya dalam keadaan perang atau dalam keadaan darurat perang, sekadar dan selama ia menganggap hal itu perlu untuk kepentingan keamanan dalam negeri dan keamanan terhadap luar negeri.

Di dalam UU federal yang mengatur akibat-akibat dari pernyataan demikian itu dan dapat pula menetapkan, bahwa kekuasaan-kekuasaan terhadap alat-alat perlengkapan kuasa sipil yang berdasarkan Konstitusi tentang ketertiban umum dan polisi, seluruhnya atau sebagian beralih kepada alat-alat perlengkapan sipil yang lain ataupun kepada kuasa ketenteraan. Bahwa penguasa-

Budi Aspani, Pergeseran Hak Prerogatif Presiden Pasca Amandemen Undang-Undang Dasar 1945, Halaman 91-111

penguasa sipil takluk kepada penguasa-penguasa ketentaraan.

(6) Pasal 178 KRIS 1949:

Presiden mengangkat wakil-wakil RIS pada negara-negara lain dan diterima wakil-wakil negara lain pada Republik Indonesia Serikat.

(7) Pasal 160 KRIS 1949:

1. Presiden mempunyai hak memberi ampun dari hukuman-hukuman yang dijatuhkan oleh keputusan hakim. Hal itu dilakukannya sesudah menerima nasehat dari Mahkamah Agung, sekedar dengan undang-undang federal, tidak ditunjuk pengadilan yang lain untuk memberi nasehat.
2. Jika hukuman mati dijatuhkan maka keputusan hakim itu tidak dapat dijalankan, melainkan sesudah Presiden menurut aturan-aturan yang ditetapkan dengan undang-undang federal, diberikan kesempatan untuk memberi ampun.
3. Amnesti hanya dapat diberikan dengan undang-undang federal ataupun, atas kuasa undang-undang federal, oleh Presiden

sesudah meminta nasehat dari Mahkamah Agung.

(8) Pasal 126 KRIS 1949 : Presiden memberikan tanda-tanda kehormatan yang diadakan dengan undang-undang federal.

3. Menurut Undang-Undang Dasar Sementara (UUDS) 1950

Di dalam batang tubuh UUDS 1950 itu terdapat Pasal-Pasal tentang hak prerogatif Presiden, antara lain:

(1) Pasal 98 ayat (1) UUDS 1950:

peraturan-peraturan penyelenggaraan undang-undang ditetapkan oleh pemerintah. Namanya ialah peraturan pemerintah.

Di dalam ketentuan-ketentuan peraturan pemerintah ini dapat mengancam hukuman atas pelanggaran terhadap aturan-aturannya dan batas-batas mengenai hukuman yang akan ditetapkan itu diatur dengan undang-undang.

(2) Pasal 127 ayat (1) UUDS 1950: Presiden memegang kekuasaan tertinggi dalam angkatan perang Republik Indonesia.

Di dalam keadaan perang pemerintah menempatkan angkatan perangnya dibawah pimpinan

Budi Aspani, Pergeseran Hak Prerogatif Presiden Pasca Amandemen Undang-Undang Dasar 1945, Halaman 91-111

seorang panglima besar dan opsir-opsir diangkat, dinaikkan pangkat dan diberhentikan oleh atau atas nama Presiden menurut aturan yang ditetapkan dengan undang-undang.

(3) Pasal 120 UUDS 1950:

1. Presiden mengadakan dan mengesahkan perjanjian dan persetujuan lain dengan negara-negara lain.

Kecuali jika ditentukan lain oleh undang-undang, perjanjian atau persetujuan lain disahkan, melainkan sesudah disetujui dengan undang-undang.

2. Masuk dalam dan memutuskan perjanjian dan persetujuan lain, dilakukan oleh Presiden hanya dengan kuasa undang-undang.

(4) Pasal 122 UUDS 1950: Pemerintah

berusaha memecahkan perselisihan-perselisihan dengan negara-negara lain dengan jalan damai dan dalam hal itu memutuskan pula tentang meminta ataupun tentang menerima pengadilan atau perwasitan antar negara

(5) Pasal 129 UUDS 1950: dengan cara dan dalam hal-hal yang akan ditentukan dengan undang-undang, Presiden dapat menyatakan daerah

RI atau bagian-bagian daripadanya dalam keadaan bahaya, bilamana ia menganggap hal itu perlu untuk kepentingan keamanan dalam negeri dan terhadap luar negeri.

(6) Pasal 123 UUDS 1950: Presiden mengangkat wakil-wakil RI pada negara-negara lain dan menerima wakil-wakil negara lain pada RI.

(7) Pasal 107 UUDS 1950:

1. Presiden memberi grasi dari hukuman-hukuman yang dijatuhkan oleh keputusan pengadilan.

Hal itu dilakukan sesudah meminta nasehat dari Mahkamah Agung sekedar dengan undang-undang tidak ditunjuk pengadilan yang lain yang memberi nasehat.

4. Jika hukuman mati dijatuhkan, maka keputusan hakim itu tidak dapat dijalankan, melainkan sesudah Presiden menurut aturan-aturan yang ditetapkan diberikan kesempatan untuk memberi grasi.

5. Amnesti dan abolisi hanya dapat diberikan dengan undang-undang ataupun kuasa undang-undang, oleh Presiden

Budi Aspani, Pergeseran Hak Prerogatif Presiden Pasca Amandemen Undang-Undang Dasar 1945, Halaman 91-111

sesudah meminta nasehat dari Mahkamah Agung.

(8) Pasal 87 UUDS 1950: Presiden memberikan tanda-tanda kehormatan yang diadakan dengan undang-undang.

(9) Pasal 96 ayat (1) UUDS 1950: Presiden berhak atas kuasa dan tanggungjawab sendiri menetapkan undang-undang darurat untuk mengatur hal-hal penyelenggaraan pemerintah yang karena keadaan-keadaan mendesak perlu diatur dengan segera.

4. Menurut Amandemen UUD 1945

MPR RI telah menetapkan perubahan pertama UUD 1945 dalam sidang umum MPR RI tanggal 14 sampai 21 Oktober 1999. perubahan kedua, dalam Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) dari tanggal 7 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2000. perubahan ketiga, dalam Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) tahun 2001. Dan perubahan keempat, dalam Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) dari tanggal 1 sampai dengan tanggal 11 Agustus

2002.

Dalam amandemen UUD 1945 tersebut terdapat Pasal-Pasal tentang hak prerogatif Presiden, yaitu:

1. Pasal 11 ayat (2) UUD 1945: Presiden dalam membuat perjanjian internasional lainnya yang membuat akibat yang luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara dan/atau mengharuskan perubahan atau pembentukan undang-undang harus dengan persetujuan DPR.
2. Pasal 13 ayat (2) UUD 1945:
 - (1) Dalam hal mengangkat duta, Presiden memperhatikan pertimbangan DPR.
 - (2) Presiden menerima duta negara lain dengan memperhatikan pertimbangan DPR.
3. Pasal 14 UUD 1945:
 - (1) Presiden memberi grasi dan rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung.
 - (2) Presiden memberi amnesti dan abolisi dengan memperhatikan pertimbangan DPR.
4. Pasal 15 UUD 1945: Presiden memberi gelar, tanda jasa dan lain-

Budi Aspani, Pergeseran Hak Prerogatif Presiden Pasca Amandemen Undang-Undang Dasar 1945, Halaman 91-111

lain tanda kehormatan yang diatur dengan undang-undang.

5. Pasal 17 ayat (2) UUD 1945: Menteri-menteri itu diangkat dan diberhentikan oleh Presiden.
6. Pasal 23F ayat (1) UUD 1945: Anggota badan pemeriksa keuangan dipilih oleh DPR dengan memperhatikan pertimbangan DPD dan diresmikan oleh Presiden.
7. Pasal 24A ayat (3) UUD 1945: Calon Hakim Agung diusulkan Komisi Yudisial kepada DPR untuk mendapatkan persetujuan dan selanjutnya dan selanjutnya ditetapkan sebagai Hakim Agung oleh Presiden.
8. Pasal 24B ayat (3) UUD 1945: Anggota Komisi Yudisial diangkat dan diberhentikan oleh Presiden dengan persetujuan DPR.
9. Pasal 24C ayat (3) UUD 1945: mahkamah konstitusi mempunyai sembilan anggota Hakim Konstitusi yang ditetapkan oleh Presiden, yang diajukan masing-masing tiga orang Mahkamah Agung, tiga orang oleh DPR dan tiga orang oleh Presiden.

B. Pergeseran Hak Prerogatif Presiden

Dari ketiga UUD yang pernah berlaku di Indonesia itu, pada batang tubuhnya terdapat ketentuan-ketentuan yang mengatur Hak Prerogatif Presiden. Untuk melihat pengaturan mengenai Hak Prerogatif Presiden dalam ketiga UUD yang pernah berlaku di Indonesia tersebut, berikut ini dijelaskan mengenai sejarah singkat ketiga UUD tersebut beserta ketentuan-ketentuan Pasalnya yang mengatur mengenai Hak Prerogatif Presiden. Dalam UUD 1945 pengaturan mengenai Hak Prerogatif Presiden tersebut diatur dalam beberapa Pasal, dari ketentuan-ketentuan Pasal-Pasal itu kedudukan sebagai pemegang hak prerogatif sangat besar dalam artian tanpa campur tangan pihak lain.

Dalam KRIS 1949 juga terdapat pengaturan mengenai hak prerogatif Presiden, namun dalam KRIS 1949 ini ada pembatasan dalam melaksanakannya seperti harus diisyaratkan terlebih dahulu dengan berdasarkan undang-undang federal. Sedangkan dalam UUDS 1950 pelaksanaan hak prerogatif Presiden sangat besar berada dalam kewenangan Presiden, namun mulai adanya

Budi Aspani, Pergeseran Hak Prerogatif Presiden Pasca Amandemen Undang-Undang Dasar 1945, Halaman 91-111

keikutsertaan lembaga lain, misalnya MA dalam pelaksanaan proses pemberian grasi. Walaupun demikian tetap saja hak prerogatif itu mutlak di tangan Presiden.

1. Pergeseran Hak Prerogatif Presiden Setelah Amandemen UUD 1945

Setelah dilakukannya amandemen UUD 1945 sebanyak tiga kali. Ternyata banyak terdapat beberapa Pasal saja di dalam batang tubuh UUD 1945 mengenai hak prerogatif Presiden yang berubah dan ditambah serta satu pasal yang tidak diubah tapi berdasarkan undang-undang penerapannya berubah. Pasal terkait hal itu terdapat pada Pasal mengenai prosedur pengangkatan Kapolri diatur dalam Pasal 11 UU Nomor 2 Tahun 2002: Kapolri diangkat dan diberhentikan oleh Presiden dengan persetujuan DPR. Usulan dalam pengangkatan dan pemberhentian Kapolri diajukan oleh Presiden kepada DPR, disertai alasan-alasannya. Persetujuan atau penolakan DPR terhadap usul Presiden tersebut harus diberikan dalam jangka waktu paling lama 20 hari terhitung sejak tanggal surat Presiden diterima oleh DPR. Apabila DPR tidak memberikan

jawaban dalam waktu yang ditentukan pada calon yang diajukan oleh Presiden maka dianggap disetujui oleh DPR. Pada saat keadaan yang mendesak, maka Presiden dapat memberhentikan sementara Kapolri dan mengangkat pelaksana tugas Kapolri dan selanjutnya dimintakan persetujuan DPR. Calon Kapolri adalah perwira tinggi Kepolisian Negara RI yang masih aktif dengan memperhatikan jenjang kepangkatan dan karier.

Pengangkatan Panglima tentara Nasional Indonesia (TNI) dimintakan persetujuannya oleh DPR. Pemerintah mengusulkan calon panglima TNI kepada DPR, kemudian melakukan tes terhadap calon panglima TNI untuk melihat visi dan misi calon tersebut. Setelah calon panglima TNI tersebut memperoleh persetujuan dari DPR, maka calon panglima TNI tersebut akan diangkat oleh Presiden sebagai panglima TNI.

Mengenai Pasal 11 ayat (2) UUD 1945, mengenai kalimatnya ada perubahan, tetapi dari substansi yang diaturnya masih sama dengan Pasal 11 UD 1945 (sebelum amandemen). Di dalam pembuatan perjanjian internasional itu terkandung tiga tahapan, yaitu: tahapan perundingan,

Budi Aspani, Pergeseran Hak Prerogatif Presiden Pasca Amandemen Undang-Undang Dasar 1945, Halaman 91-111

tahapan penandatanganan dan tahapan pengesahan. Presiden dalam membuat perjanjian internasional itu harus dengan persetujuan DPR, ini berarti terjadinya perjanjian yang mengikat adalah apabila perjanjian itu dilakukan dengan disertai persetujuan dari DPR. Sehingga persetujuan dari DPR tersebut tidak perlu lagi adanya pada tahap perundingan ataupun penandatanganan, akan tetapi cukup pada tahap pengesahan. Tidak ada gunanya tahap-tahap perundingan dan penandatanganan itu bagi suatu perjanjian yang mensyaratkan pengesahan apabila pengesahan itu ternyata tidak dapat dilakukan.

Pada Pasal 13 ayat (2) dan ayat (3) UUD 1945 terkait keikutsertaan DPR dengan memberikan pertimbangannya terhadap pengangkatan duta dan penerimaan penempatan duta negara lain. Terdapat peran DPR untuk memberikan pertimbangan berupa pendapat tertentu baik atau buruk, meskipun keputusan itu disampaikan sebagai nasehat kepada Presiden. Walaupun demikian keputusan akhir tahap pengangkatan duta dan penerimaan penempatan duta negara lain tetap berada di pihak Presiden. Jika dukungan dari DPR

terhadap pengangkatan duta dan penerimaan, penempatan duta negara lain tidak ada, dan Presiden tetap dengan keputusannya. Maka Presiden tidak dapat diberhentikan dari jabatannya sebagai Presiden. Presiden dapat diberhentikan dari jabatannya itu atas usul DPR kepada MPR hanya dapat dilakukan berdasarkan pada ketentuan Pasal 7 A UUD 1945.

Pada Pasal 14 UUD 1945, tidak ada pemisahan kewenangan sebelum dilakukannya amandemen terhadap UUD 1945. Presiden memiliki kewenangan dalam hal memberikan grasi, amnesti, abolisi dan rehabilitasi. Tetapi setelah dilakukan amandemen, kewenangan tersebut tetap menjadi kewenangan Presiden, tetapi terdapat pemisahan kewenangan memberi grasi dan rehabilitasi yakni dengan memperhatikan pertimbangan MA, serta dalam hal kewenangan memberi amnesti dan abolisi dengan memperhatikan pertimbangan DPR.

Grasi berasal dari kata *Gratie* yang berarti wewenang dari Kepala Negara untuk memberikan pengampunan terhadap hukuman yang telah dijatuhkan oleh hakim, untuk menghapuskan seluruhnya, sebagian atau merubah sifat/bentuk hukuman

Budi Aspani, Pergeseran Hak Prerogatif Presiden Pasca Amandemen Undang-Undang Dasar 1945, Halaman 91-111

itu.³ Grasi merupakan upaya hukum istimewa, yang dapat dilakukan atas sesuatu putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, termasuk putusan MA.

Pengaturan masalah grasi ini adalah dalam UU Nomor 3 Tahun 1950 tentang Grasi. Berdasarkan Pasal 1 UU Nomor 3 Tahun 1950 menyatakan : atas hukuman-hukuman yang telah dijatuhkan oleh keputusan hakim, baik sipil maupun militer yang tidak dapat diubah lagi, orang yang dihukum atau pihak lain dapat memajukan permohonan grasi kepada Presiden. Dari ketentuan ini diketahui bahwa yang berhak memajukan permohonan grasi adalah terpidana itu sendiri atau pihak lainnya atas persetujuan terpidana. Pihak lain yang dimaksudkan adalah keluarga terpidana atau penasehat hukum yang mendapat kuasa dari terpidana.

Rehabilitasi adalah hak seseorang untuk mendapatkan pemulihan hanya dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya yang diberikan pada tingkat penyidikan, penuntutan dan atau peradilan karena ditangkap, ditahan, dituntut ataupun

diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau kerana kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan menurut cara yang diatur dalam undang-undang (Pasal 1 butir 23 KUHAP).

Dasar hukum rehabilitasi adalah Pasal 77 b KUHAP yang menetapkan bahwa pengadilan negeri berwenang untuk memeriksa dan memutuskan perkara sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini tentang rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya pada tingkat penyidikan atau penuntutan.

Alasan untuk mengajukan permintaan rehabilitasi adalah sebagai berikut:

- a. Akibat tidak sahnya penangkapan atas diri seseorang.
- b. Akibat tidak sahnya penahanan atas diri seseorang.
- c. Akibat sahnya penghentian penyidikan.
- d. Akibat sahnya penghentian penuntutan.

Sedangkan permintaan rehabilitasi dapat diajukan oleh tersangka dan pihak ketiga yang berkepentingan. Yang dimaksud dengan pihak ketiga yang berkepentingan adalah:

³ JCT. Simorangkir, *Hukum dan Konstitusi Indonesia* (Jakarta: Gunung Agung, 1983).

Budi Aspani, Pergeseran Hak Prerogatif Presiden Pasca Amandemen Undang-Undang Dasar 1945, Halaman 91-111

- a. Keluarga dari tersangka.
- b. Kuasa dari tersangka.
- c. Pengadu atau pelapor.

Berdasarkan keterangan di atas, pemberian grasi dan rehabilitasi oleh Presiden dengan memperhatikan pertimbangan MA, dimaksudkan agar pemberian itu tidak menimbulkan gangguan terhadap tertib hukum yang telah digariskan dalam peraturan perundang-undangan dan itu menjadi tugas MA dalam menegakkan hukum, mengawasi peradilan di bawahnya dan sebagai peradilan kasasi. Dengan demikian pemberian grasi dan rehabilitasi ini menjadi pertimbangannya adalah dari segi hukumnya.

Sedangkan pemberian amnesti dan abolisi oleh Presiden dengan memperhatikan pertimbangan DPR, dimaksudkan karena pemberian amnesti dan abolisi itu yang menjadi pertimbangannya adalah dari segi kebijaksanaan politiknya. Hal ini berkaitan dengan tugas dari DPR sebagai lembaga negara yang mempunyai tugas mengawasi kebijaksanaan pemerintah yang sesuai dengan jiwa UUD 1945.

Sebelum diamandemen, UUD 1945, berdasarkan UU Nomor 5 Tahun

1973 tentang Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Anggota BPK itu diangkat oleh Presiden atas usul DPR, untuk setiap lowongan keanggotaan BPK, oleh DPR diusulkan 3 orang calon.

Mengenai BPK pada Pasal 23 F UUD 1945 menyatakan:

1. Anggota Badan Pemeriksa Keuangan dipilih oleh DPR dengan memperhatikan pertimbangan DPD dan diresmikan oleh Presiden
2. Pimpinan Badan Pemeriksa Keuangan dipilih dari dan oleh anggota.

Pemilihan anggota BPK oleh DPR dengan memperhatikan pertimbangan DPD tidak dimaksudkan bahwa BPK itu kedudukannya berada di bawah DPR maupun DPD. DPD dan BPK mempunyai kedudukan yang sama sebagai Lembaga Tinggi Negara, hanya proses pemilihannya saja yang berbeda. Anggota DPD dipilih dalam pemilihan umum langsung oleh rakyat, sedangkan anggota BPK dipilih oleh DPR dengan memperhatikan pertimbangan DPD dan diresmikan oleh Presiden. Pertimbangan DPD dalam pemilihan BPK, dimaksudkan karena DPD yang dipilih dari setiap provinsi melalui pemilihan umum

Budi Aspani, Pergeseran Hak Prerogatif Presiden Pasca Amandemen Undang-Undang Dasar 1945, Halaman 91-111

mempunyai tugas diantaranya berkaitan dengan pengajuan rancangan undang-undang yang berkaitan dengan pertimbangan keuangan pusat dan daerah.

Pasal 24 A ayat (3) UUD 1945 menyatakan: Calon Hakim Agung diusulkan Komisi Yudisial kepada DPR untuk mendapatkan persetujuan dan selanjutnya dan selanjutnya ditetapkan sebagai Hakim Agung oleh Presiden. Dari ketentuan di atas diketahui bahwa muncul lembaga baru yang mengusulkan calon Hakim Agung yaitu Komisi Yudisial.

Berdasarkan Pasal 8 UU Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, menyatakan :

1. Hakim Agung diangkat oleh Presiden selaku Kepala Negara dari daftar nama calon yang diusulkan oleh DPR.
2. Daftar nama calon sebagaimana dimaksudkan dalam ayat (1) diajukan oleh DPR kepada Presiden selaku Kepala Negara setelah DPR mendengar pendapat MA dan Pemerintah.
3. Ketua dan wakil ketua MA diangkat oleh Presiden selaku Kepala Negara diantara Hakim Agung yang diusulkan oleh DPR.
4. Ketua Muda MA diangkat oleh Presiden selaku Kepala Negara diantara Hakim Agung yang diusulkan oleh Ketua MA.

5. Untuk mengisi lowongan jabatan ketua, wakil ketua, ketua muda dan hakim anggota MA, diusulkan masing-masing 2 orang calon.

Pada dasarnya pengangkatan Hakim Agung berdasarkan sistem karier dan tertutup. Namun demikian hal-hal tertentu dapat pula dibuka kemungkinan untuk mengangkat Hakim Agung yang tidak berdasarkan atas sistem karier.

Daftar nama calon Hakim Agung yang berasal baik dari kalangan hakim karier maupun dari luar kalangan hakim karier disusun berdasarkan konsultasi antar DPR, Pemerintah, dan MA yang pelaksanaannya disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku pada lembaga masing-masing. Persetujuan dari lembaga DPR terhadap calon Hakim Agung yang diusulkan oleh Komisi Yudisial ini sangat diperlukan. DPR sebagai lembaga perwakilan rakyat yang dihasilkan dalam proses pemilihan umum ini mempunyai kedaulatan yang dilimpahkan dari rakyat kepadanya.

Dengan adanya pelimpahan kedaulatan rakyat kepada DPR, maka diharapkan segala kebijaksanaan yang menyangkut kepentingan rakyat harus terlebih dahulu memperoleh persetujuan dari rakyat melalui wakil-

Budi Aspani, Pergeseran Hak Prerogatif Presiden Pasca Amandemen Undang-Undang Dasar 1945, Halaman 91-111

wakilnya di DPR. Berdasarkan Pasal 24 B ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan: Anggota Komisi Yudisial diangkat dan diberhentikan oleh Presiden dengan persetujuan DPR. Berdasarkan ketentuan di atas persetujuan DPR tersebut sangat diperlukan. Presiden tidak dapat mengangkat dan memberhentikan Komisi Yudisial tanpa adanya persetujuan dari DPR. Adanya persetujuan dari DPR dimaksudkan sebagai dukungan dari DPR dalam memberikan dukungan terhadap kebijaksanaan yang diputuskan oleh Presiden.

Komisi Yudisial ini bersifat mandiri dan berwenang mengusulkan pengangkatan Hakim Agung dan mempunyai kewenangan lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat serta perilaku hukum. Berdasarkan Pasal 24C ayat (3) UUD 1945: Mahkamah Konstitusi mempunyai sembilan anggota Hakim Konstitusi yang ditetapkan oleh Presiden, yang diajukan masing-masing tiga orang Mahkamah Agung, tiga orang oleh DPR dan tiga orang oleh Presiden. Hakim harus mempunyai integritas dan kepribadian yang tidak tercela, adil,

negarawan yang menguasai konstitusi dan ketatanegaraan, serta tidak merangkap sebagai pejabat negara.

Dengan adanya kekuatan yang seimbang dalam Mahkamah Konstitusi dilihat dari komposisi anggotanya, dengan adanya perwakilan dari MA sebagai lembaga yudisial, DPR sebagai lembaga legislatif dan pemerintah sebagai lembaga eksekutif diharapkan keputusan yang diambil mencerminkan pertimbangan-pertimbangan yang didasarkan kepada kepentingan ketiga lembaga yang diwakilinya yang pada akhirnya bertujuan untuk kesejahteraan dan kemakmuran rakyat Indonesia. Mengenai pengangkatan dan pemberhentian Hakim Konstitusi, hukum acara serta ketentuan lainnya tentang Mahkamah Konstitusi diatur oleh undang-undang.

2. Pengaruh Pergeseran Hak Prerogatif Presiden Terhadap Sistem Pemerintahan

Di dalam amandemen UUD 1945 terdapat beberapa Pasal yang berkaitan dengan hak prerogatif Presiden yang mengalami perubahan dan penambahan, yaitu Pasal 10, Pasal 11 ayat (2), Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 23 F, Pasal 24 A, Pasal 24 B ayat (3) dan Pasal 24 C ayat (3) UUD 1945.

Budi Aspani, Pergeseran Hak Prerogatif Presiden Pasca Amandemen Undang-Undang Dasar 1945, Halaman 91-111

Mengenai sistem pemerintahan Indonesia, kita dapat melihat karakteristiknya pada Pasal 4 ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan: “Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar”. Dalam Pasal 17 ayat (2) juga dinyatakan: Menteri-Menteri itu diangkat dan diberhentikan oleh Presiden. Menteri-menteri ini sebagai pembantu Presiden bertugas memimpin departemen-departemen pemerintah dan bertanggungjawab kepada Presiden. Badan perwakilan tidak dapat memberhentikan seseorang atau beberapa orang menteri yang turut bekerja di dalam eksekutif, meskipun badan perwakilan rakyat itu tidak dapat menyetujui kebijaksanaan para menteri tersebut. Para menteri itu tidak mempunyai hubungan keluar, dalam arti hubungan pertanggungjawaban dengan badan perwakilan rakyat. Yang bertanggungjawab terhadap pelaksanaan tugas yang diberikan kepada mereka oleh Kepala Negara sendiri. Sedangkan Kepala Negara inipun tidak bertanggungjawab kepada badan perwakilan rakyat atas kebijaksanaan penyelesaian tugas-tugasnya.

Berdasarkan ketentuan Pasal 6 A UUD 1945 yang menyatakan : Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat. Jadi berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1), Pasal 17 ayat (2) dan Pasal 6 A UUD 1945, Indonesia mempunyai karakteristik sistem pemerintahan Presidensill. Jika dilihat dari ketentuan Pasal 5 ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan: Presiden berhak mengajukan rancangan undang-undang kepada DPR. Dihubungkan dengan Pasal 21 UUD 1945 yang menyatakan: Anggota DPR berhak mengajukan usul rancangan undang-undang. Maka dapat dinyatakan bahwa UUD 1945 ini tidak menganut sistem Presidensill sepenuhnya, karena menurut Pasal-Pasal di atas Presiden dan DPR bersama-sama membuat undang-undang.

Dilihat dari ketentuan Pasal 7 A UUD 1945 yang menyatakan: Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat diberhentikan dalam masa jabatannya oleh MPR atas usul DPR, baik apabila terbukti telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela maupun apabila terbukti tidak

Budi Aspani, Pergeseran Hak Prerogatif Presiden Pasca Amandemen Undang-Undang Dasar 1945, Halaman 91-111

lagi memenuhi syarat-syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden. Dari ketentuan di atas, MPR sebagai Lembaga Tinggi Negara berdasarkan usul dari DPR dapat memberhentikan Presiden dan Wakil Presiden.

Dari ketentuan-ketentuan Pasal 13 ayat (2) dan (3), Pasal 14 ayat (2), Pasal 23 F ayat (1), Pasal 24 A ayat (3), Pasal 24 B ayat (3) UUD 1945, dapat diketahui adanya kedudukan DPR yang lebih besar dari Presiden dan juga dalam hal pengangkatan Kapolri dan Panglima TNI serta Dewan Gubernur Bank Indonesia. Maka berdasarkan ketentuan-ketentuan di atas, menunjukkan bahwa di dalam Amandemen UUD 1945 juga mempunyai karakteristik dari sistem pemerintahan parlementer.

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Amandemen UUD 1945 yang dilakukan sebanyak empat kali, mempunyai pengaruh terhadap kedudukan Presiden dalam melaksanakan hak prerogatifnya. Hak prerogatif Presiden yang sebelum amandemen dilaksanakan bukan murni untuk melaksanakan kewajiban Konstitusional Presiden, tetapi sering

dipergunakan sebagai imbalan jasa politik. Setelah amandemen UUD 1945 terjadi pergeseran dalam penerapan hak prerogatif Presiden, yaitu dengan diikutsertakan lembaga negara lainnya dalam pelaksanaan hak prerogatif.

Dalam sistem pemerintahan negara Indonesia yang sebelum dilakukannya amandemen menggunakan sistem pemerintahan quasi Presidensiil, ternyata setelah dilakukannya amandemen UUD 1945 masih dipertahankan. Dalam amandemen UUD 1945 mengenai hak prerogatif Presiden tidak mengakibatkan berubahnya sistem pemerintahan Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Konstitusi Republik Indonesia Serikat 1949.
- Lubis, M. Solly. *Ketatanegaraan RI*. Bandung: Mandar Maju, 1993.
- Marshaal, H. *Amandemen UUD 1945 Dalam Sorotan*. Palembang: UMP, 2003.
- Simorangkir, JCT. *Hukum dan Konstitusi Indonesia*. Jakarta: Gunung Agung, 1983.
- Undang-Undang Dasar 1945.
- Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen.
- Undang-Undang Dasar Sementara 1950.